



Kuota Tiga Ribu Ton Jadi Batas Akhir

Pemkot Didesak Maksimalkan Pengelolaan Sampah Mandiri

JOGJA - Pemprov DIJ mendorong Pemkot Jogja dapat memaksimalkan pengelolaan sampah mandiri tanpa membuangnya ke tempat pembuangan akhir (TPA) regional. Sebab, kuota sampah yang dibagikan untuk dibuang ke Piyungan tak bisa bertambah atau tetap hanya 3 ribu ton.

"Karena setelah itu (TPA) Piyungan sudah tidak bisa lagi (menerima sampah)," ujar Sekprov DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti saat dikonfirmasi, kemarin (29/9).

Pemberian kuota tersebut sebagai tindak lanjut adanya kondisi darurat sampah di Kota Jogja. Khususnya mulai ditemukan timbunan sampah berlebih di depo-depo sampah di Kota Jogja.

Menurutnya, kondisi di TPA Piyungan sudah penuh dan tidak memungkinkan apabila menerima sampah berlebih. Alokasi 3 ribu ton tersebut bisa dilakukan setelah menyalurkan residu sampah di sana.

"Residu di Piyungan sudah dikurangi sehingga masih bisa menampung 3.000 ton," jelasnya.

Dengan upaya penyaluran residu itu, ruang untuk menerima sampah di TPA Piyungan hanya bisa menangani lima depo di Kota Jogja. Pemkot Jogja, lanjutnya, sudah diberikan peringatan sejak jauh hari bahwa kuota tersebut merupakan kesempatan terakhir untuk bisa mengakses TPA Piyungan.

"Misal yang di Bawuran kemarin Kota Jogja sudah *jagakke*, ternyata Bawuran tidak berproses karena banyak kendala," terangnya.



MENUMPUK: Pengendara melintas di depan depo yang kondisinya masih menumpuk di Jalan Brigjend Katamsno, Jogja, kemarin (29/9).

Ia menilai, Pemkot Jogja memang relatif tidak memiliki lahan untuk pengolahan sampah. Namun, dia menyebut perlu dilakukan diskusi bersama untuk solusi pengelolaan sampah. Terlebih pemkot mempunyai anggaran untuk itu. "Bagaimana kemudian kerja sama dengan wilayah lain untuk pengolahan sampah dari kota," katanya. Kemudian dalam rencana penanganan sampah jangka panjang, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Pembangunan PSEL tersebut akan ditargetkan pada 2027 mendatang.

"Besok saya ke Jakarta berkaitan dengan tindak lanjut perpres yang berkaitan pengelolaan sampah akan dipusatkan pemerintah," ucapnya. Disisi lain, Pemprov DIJ juga melihat adanya progress yang positif yang dijalankan Pemkot Jogja untuk mengatasi permasalahan sampah. Salah satunya melakukan banyak cara pengolahan sampah ditingkat rumah tangga dan pembinaan di masyarakat. "Mereka *kan* sudah punya perwal pengurangan penggunaan kantong plastik. Itu mestinya diterapkan khususnya ketika belanja di toko modern," tambahnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (DLHK) DIJ Kusno Wibowo menilai, saat ini Kota Jogja belum bisa mengelola sampah secara mandiri. Pemberian kuota tersebut menurutnya sebagai langkah darurat agar permasalahan penumpukan di depo Kota Jogja dapat teratasi terlebih dahulu. "Targetnya mulai Januari 2026 TPA Piyungan sudah tidak menerima sampah dari kabupaten/kota," ujarnya. Sisa kuota sampah di TPA Piyungan sampai akhir tahun ini seluruhnya diberikan kepada Kota Jogja. Daerah lain seperti Kabupaten Sleman dan Bantul, sampah dialokasikan di luar TPA Piyungan. (**oso/wia/zi**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005